

Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah Pendidikan Islam

Musdalipah

STISIPOL Veteran Palopo, Indonesia
musdalipa@stisipveteran.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sekolah pendidikan Islam, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menelaah berbagai regulasi, penelitian terdahulu, dan literatur terkait kebijakan pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, kurangnya infrastruktur, serta standar pengajaran yang belum merata. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan desentralisasi pengelolaan madrasah, peningkatan alokasi anggaran, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing pendidikan Islam di era modern.

Kata Kunci: *Kebijakan pendidikan Islam, kualitas pendidikan, madrasah, desentralisasi*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan akhlak dan moral peserta didik (Abdurrohman, 2022). Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan Islam menjadi hal yang sangat penting untuk menjawab tantangan zaman dan dinamika globalisasi (Dacholfany, 2017).

Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan Islam, tidak dapat hanya berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana, revisi kurikulum, atau peningkatan kualifikasi peserta didik tanpa memperhatikan kesejahteraan pendidik. (Ainiyah, 2013) Pendidik dalam konteks pendidikan Islam, bukan hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai murabbi (pembimbing spiritual dan moral). Oleh karena itu, kesejahteraan dan kompetensi pendidik menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Anwar, 2019).

Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, memiliki peran strategis dalam menetapkan arah dan kebijakan pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak

pada satuan pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, tetapi juga berpengaruh secara luas dalam membangun peradaban Islam yang unggul. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam sangat diperlukan agar mampu menciptakan sistem pendidikan yang holistik, mencakup aspek intelektual, spiritual, dan kesejahteraan pendidik. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip kebijakan pendidikan Islam menjadi esensial dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak transformatif bagi masyarakat dan umat.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem pendidikan Islam dituntut untuk terus beradaptasi dan berkembang. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sekolah pendidikan Islam, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pendidikan Islam agar sejajar dengan sistem pendidikan nasional (Ilham, 2019). Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan alokasi anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya efektivitas manajemen pendidikan di banyak lembaga pendidikan Islam (Ilham, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sekolah pendidikan Islam, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu sekolah pendidikan Islam, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola pendidikan Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan model pendidikan Islam yang adaptif dan inovatif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sekolah pendidikan Islam (Kuhlthau, 2002). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal akademik, peraturan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu terkait kebijakan pendidikan Islam.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Rukajat, 2018). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi

faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan Islam, baik dari aspek regulasi, manajemen pendidikan, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumentasi, yaitu membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari berbagai referensi yang relevan. Studi ini juga meninjau kebijakan-kebijakan utama seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta berbagai regulasi terkait standar nasional pendidikan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sekolah pendidikan Islam serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sekolah pendidikan Islam

Pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sekolah pendidikan Islam melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu upaya utama yang telah dilakukan adalah penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesetaraan bagi madrasah dan sekolah Islam dalam sistem pendidikan nasional. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal alokasi anggaran yang masih lebih kecil dibandingkan sekolah umum serta sistem pengelolaan yang masih bersifat sentralistik di bawah Kementerian Agama. Akibatnya, madrasah belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan kualitas pendidikan (Afkari et al., 2022).

Salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam adalah pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program seperti sertifikasi guru, pelatihan pedagogik, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk meningkatkan kualitas pengajaran di madrasah. Namun, masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan ini, seperti rendahnya jumlah guru bersertifikasi, keterbatasan distribusi tenaga pendidik di daerah terpencil, serta rendahnya kesejahteraan guru, terutama di madrasah swasta. Faktor ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara madrasah yang berada di kota dengan yang berada di wilayah pedesaan (Arief, 2021).

Dalam aspek standarisasi kurikulum, pemerintah telah menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengintegrasikan kurikulum berbasis kompetensi antara ilmu umum dan pendidikan agama Islam. Kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek intelektual dan spiritual peserta didik. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan seperti kurikulum yang terlalu padat, kurangnya fleksibilitas dalam penerapan di madrasah swasta, serta metode pembelajaran yang belum inovatif. Banyak madrasah masih menggunakan metode pembelajaran konvensional berbasis ceramah, yang kurang mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam model pembelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi digital, *blended*

learning, serta pendekatan berbasis proyek untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Islam.

Selain kurikulum, infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sekolah pendidikan Islam. Sayangnya, banyak madrasah di Indonesia masih mengalami keterbatasan fasilitas belajar, termasuk laboratorium, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi. Pemerintah telah mengalokasikan dana melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi realisasinya masih belum merata. Madrasah swasta, yang mayoritas dikelola oleh masyarakat, sering kali hanya mengandalkan swadaya tanpa dukungan signifikan dari pemerintah. Ketimpangan ini menyebabkan kualitas pendidikan di madrasah berbeda secara signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang lebih proporsional serta kebijakan yang lebih inklusif agar madrasah swasta mendapatkan dukungan yang memadai (Huda, 2016).

Implikasi dari berbagai kebijakan pendidikan Islam juga dapat dilihat dari mutu lulusan madrasah. Meskipun madrasah telah menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman agama yang baik, mereka masih menghadapi tantangan dalam hal daya saing di dunia kerja dan perguruan tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penguasaan terhadap keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi. Selain itu, masih terdapat stigma bahwa pendidikan Islam kurang kompetitif dibandingkan pendidikan umum, yang berdampak pada peluang lulusan madrasah untuk bersaing dalam dunia profesional (Fahmi, 2020). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi pendidikan Islam yang lebih berbasis *skill-based learning*, serta peningkatan kerja sama antara madrasah dengan perguruan tinggi dan dunia industri.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan madrasah dan sekolah berbasis Islam. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana melalui berbagai skema seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), realisasi anggaran untuk sekolah Islam, khususnya madrasah swasta, masih jauh dari cukup. Sebagian besar madrasah swasta harus bergantung pada dana masyarakat atau yayasan yang mengelola sekolah tersebut, yang menyebabkan kesenjangan fasilitas dan mutu pendidikan antara madrasah negeri dan swasta. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada sarana dan prasarana yang tidak memadai, gaji guru yang rendah, serta minimnya akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas (Hidayah, 2023).

Selain itu, rendahnya kesejahteraan guru madrasah menjadi tantangan serius yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan Islam. Banyak guru madrasah, terutama di sektor swasta, menerima gaji yang jauh di bawah standar nasional, bahkan ada yang hanya mengandalkan honorarium dari sumbangan masyarakat. Akibatnya, banyak guru madrasah yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang pada akhirnya mengurangi fokus dan dedikasi mereka dalam proses pembelajaran. Rendahnya kesejahteraan guru juga menyebabkan kurangnya motivasi dalam meningkatkan kompetensi diri, seperti

mengikuti pelatihan atau sertifikasi, sehingga kualitas pengajaran di madrasah sulit berkembang.

Di sisi lain, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di madrasah, terutama di daerah terpencil, semakin memperburuk kondisi pembelajaran. Banyak madrasah masih beroperasi dengan fasilitas yang sangat minim, seperti ruang kelas yang sempit, laboratorium yang tidak memadai, serta kurangnya akses terhadap perpustakaan dan bahan ajar yang berkualitas. Keterbatasan ini membuat proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan tidak kondusif, terutama dalam mendukung pendekatan pembelajaran berbasis teknologi dan inovasi. Madrasah swasta yang tidak mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah sering kali kesulitan dalam melakukan perbaikan infrastruktur, sehingga kesenjangan antara madrasah di perkotaan dan di daerah terpencil semakin besar.

Selain keterbatasan infrastruktur, tantangan lainnya adalah standar pengajaran yang belum merata di seluruh satuan pendidikan Islam. Standarisasi kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik madrasah di berbagai daerah. Kurikulum yang terlalu kaku dan padat membuat madrasah kesulitan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, perbedaan kualitas tenaga pendidik dan metode pengajaran di setiap madrasah menyebabkan output lulusan yang beragam (Hidayat & Ibrahim, 2023). Beberapa madrasah mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia akademik maupun profesional, sementara yang lain masih tertinggal dalam hal penguasaan keterampilan abad ke-21.

Strategi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan Islam

Salah satu rekomendasi utama untuk mengatasi tantangan ini, adalah desentralisasi pengelolaan madrasah, sehingga madrasah memiliki lebih banyak otonomi dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Saat ini, madrasah masih sangat bergantung pada kebijakan pusat yang sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik di tingkat daerah. Dengan desentralisasi, madrasah dapat lebih fleksibel dalam mengembangkan kurikulum, meningkatkan kesejahteraan guru, serta mengelola anggaran pendidikan secara lebih efisien. Pelibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pengelolaan madrasah juga perlu ditingkatkan, agar kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan (Arifah, 2020).

Selain desentralisasi, peningkatan anggaran pendidikan Islam juga harus menjadi prioritas utama pemerintah. Anggaran yang lebih besar diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur madrasah, meningkatkan kesejahteraan guru, serta menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi dana untuk madrasah tidak hanya berfokus pada madrasah negeri, tetapi juga mencakup madrasah swasta yang selama ini masih kurang mendapatkan perhatian. Selain itu, mekanisme penyaluran dana harus lebih transparan dan akuntabel, agar tidak terjadi ketimpangan dalam distribusi anggaran pendidikan Islam (Arif, 2013).

Terakhir, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran harus ditingkatkan agar pendidikan Islam tetap relevan dan kompetitif di era modern. Banyak madrasah masih belum mengadopsi sistem pembelajaran digital, yang menyebabkan peserta

didik tertinggal dalam literasi teknologi dibandingkan dengan siswa dari sekolah umum. Pemerintah perlu mendorong penggunaan teknologi seperti *e-learning*, *blended learning*, serta pengembangan platform pendidikan berbasis digital yang dapat diakses oleh madrasah di seluruh Indonesia (Arifah, 2020). Selain itu, pelatihan bagi tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi pendidikan juga harus menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kualitas pendidikan Islam.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sekolah pendidikan Islam telah mengalami perkembangan melalui regulasi yang mendukung kesetaraan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesejahteraan guru, kurangnya sarana dan prasarana, serta standar pengajaran yang belum merata. Kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta, serta kurangnya pemanfaatan teknologi, turut menghambat peningkatan mutu pendidikan Islam.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah minimnya anggaran, standar kurikulum yang masih kaku, serta metode pembelajaran yang kurang inovatif. Akibatnya, lulusan madrasah masih menghadapi kesulitan dalam bersaing di dunia akademik dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pendidikan Islam agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu mendorong desentralisasi pengelolaan madrasah, meningkatkan alokasi anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dengan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan kolaboratif, pendidikan Islam di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan menghasilkan lulusan yang unggul serta berdaya saing tinggi.

Referensi

- Abdurrohman, M. C. (2022). Perencanaan Kurikulum Pendidikan Islam. *Rayah Al-Islam*, 6(01), 11–28.
- Afkari, S. G., Subekti, H. I., Suaduon, J., Parida, P., Aziwantoro, J., Maisah, M., & Jamrizal, J. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia di Madrasah. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 498–513.
- Ainiyah, N. (2013). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Al-Ulum*, 13(1), 25–38.
- Anwar, S. (2019). Pendidikan Karakter Islam Dalam Dunia Pendidikan Indonesia. *Tafhim Al-'Ilmi*, 11(1), 164–163.
- Arief, M. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SD Insan Amanah Malang). *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 1–13.
- Arif, M. (2013). Manajemen madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Islam. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(2), 415–438.
- Arifah, N. (2020). Manajemen perubahan dalam mewujudkan madrasah berprestasi. *Muróbbî: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 57–70.
- Dacholfany, M. I. (2017). Inisiasi strategi manajemen lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia islami di Indonesia dalam

- menghadapi era globalisasi. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(01). <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/view/330>
- Fahmi, F. (2020). *Manajemen pendidikan pengembangan madrasah dan profesionalisme guru pada lembaga pendidikan islam*. K-Media. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2636/1/Manajemen%20Pendidikan_Fahmi.pdf
- Hidayah, H. (2023). Pengintegrasian Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) Di SD Swasta Widya 4 Batam. *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 18–28.
- Hidayat, H., & Ibrahim, I. (2023). Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Mutu Sumber Daya Tenaga Pendidik. *Jambura Journal of Educational Management*, 312–325.
- Huda, K. (2016). Problematika madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan islam. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(2), 309–336.
- Ilham, D. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122.
- Ilham, D. (2020). The Challenge of Islamic Education and How to Change. *International Journal of Asian Education*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.46966/ijae.v1i1.16>
- Kuhlthau, C. C. (2002). *Teaching the Library Research Process*. Rowman & Littlefield.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.